

PERLUASAN KOTA DALAM REALITAS SOSIAL DAN KULTURAL MASYARAKAT

T. Yoyok Wahyu Subroto

Abstract

The expansion of cities is one of the most interesting issues, especially in the backdrop of increasing scarcity of space for the burgeoning population as well as environmental concerns, which among other things, advocate for the preservation of conservation areas on the city's outskirts. The expansion of cities has resulted into the spatial, social, and cultural transformation of suburban areas. The importance of adopting spatial development pattern for areas on city fringes should foster the formulation of development that should take cognizance of the social and spatial aspects of such areas. Upon implementation, spatial development pattern will facilitate the proper phasing, and direction of the transformation process. Proper urban /city development and expansion should be conducted through five phases, which entail: 1) determining the goal, 2) creating the development and conservation pattern, 3) identifying the area of focus, 4) planning, 5) and implementation. If city development is based on the five phases aforementioned, it should evolve into a controllable expansion pattern, which is known as accretion expansion.

Pendahuluan

Salah satu pendorong tingginya mobilitas penduduk desa ke kota dalam skala besar (*massive urbanization*) adalah adanya kenyataan bahwa kota memiliki daya tarik (*pull factor*) kuat secara ekonomi. Pada banyak kasus, kaum migran yang datang ke kota sering tidak memiliki kesiapan untuk hidup di kota, baik karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan maupun tidak adanya tempat tinggal permanen yang mampu mendukung eksistensi mereka di kota. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang telah mempercepat laju proses taudifikasi atau penurunan kualitas (*deterioration process*), baik pada kondisi fisik keruangan dan kondisi sosiologis masyarakat maupun kondisi ekologis, khususnya di area tempat penduduk banyak bermukim di perkotaan. Selama ini perhatian para pemerhati masalah mobilitas penduduk

kebanyakan tertuju pada proses migrasi penduduk dari desa ke kota, yang secara praktis cenderung memberikan kontribusi pada pemikiran alternatif solusi kasus masalah yang terjadi di perkotaan. Di pihak lain realitas di lapangan menunjukkan bahwa desa-desa yang ditinggalkan baik secara permanen maupun sementara telah meninggalkan persoalan tersendiri. Hal tersebut paling tidak jika dilihat dari semakin tidak menariknya sektor pertanian bagi para petani akibat sektor ini sampai saat ini belum banyak memberikan motivasi ke arah kemakmuran, di samping budidaya pertanian yang sulit menerapkan teknologi maju. Di pihak lain, dari sisi pandang para konservasionis lingkungan, kondisi tersebut akan memberikan dampak cukup serius terhadap terjadinya perubahan tata guna lahan dan keseimbangan ekologis karena semakin berkurangnya penduduk yang menggarap sawahnya. Hal ini didukung oleh data statistik demografi serta prediksi BPS yang dibuat untuk satu dekade mendatang. Jika pada 1990 penduduk perdesaan di Indonesia masih berjumlah 69 persen, diperkirakan dengan laju pertumbuhan penduduk desa yang hanya 1,2 persen per tahun, diperkirakan pada 2010 nanti penduduk perdesaan akan menjadi 48 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, lahan pertanian produktif akan menyusut sekitar 2,4 juta hektar. Fenomena ini paling tidak telah menimbulkan dua eksese dalam kehidupan masyarakat perdesaan kita dewasa ini, yaitu semakin berkembangnya pekerjaan yang mengabsorpsi tenaga kerja nonpertanian serta meningkatnya hedonisme masyarakat yang dicerminkan oleh perilaku konsumtif terhadap produk-produk industri seiring dengan semakin banyaknya manusia yang ingin hidup dengan gaya hidup kota.

Pada kondisi tersebut di atas, daerah pinggiran (*urban fringe*) berpotensi menjadi daerah yang rentan terhadap dampak perubahan, baik secara fisik keruangan maupun psikis sosial masyarakat akibat terjadinya penetrasi lahan kekotaan ke lahan kedesaan. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh adanya kekuatan yang dimiliki oleh kota dan penduduknya dalam mengubah kondisi desa-desa di pinggiran kota. Sargent dalam Yunus (2001) mengidentifikasi lima kekuatan yang menyebabkan terjadinya pemekaran dan perubahan kota secara morfologis yaitu (1) peningkatan jumlah penduduk yang besar, baik alami maupun migrasi; (2) peningkatan kesejahteraan penduduk secara

ekonomi sehingga terjadi fenomena *urban outflow*, yaitu kecenderungan masyarakat kota untuk memilih tempat tinggal di pinggiran kota yang relatif memiliki kualitas lingkungan lebih baik; (3) peningkatan pelayanan transportasi karena kemajuan teknologi; (4) penurunan peranan pusat kota sebagai pusat kegiatan fungsi kekotaan, dan (5) peningkatan peranan para pengembang dalam menyediakan lokasi baru permukiman dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus kelima kekuatan tersebut di atas menyebabkan melemahnya perspektif positif terhadap eksistensi wilayah perdesaan.

Kasus-kasus yang dijumpai di lapangan memperlihatkan juga bahwa perubahan desa-desa menjadi kota terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Fenomena ini dapat dilihat pada kecepatan pertumbuhan kawasan-kawasan baru di pinggiran kota baik untuk fungsi permukiman, pendidikan, maupun jasa di berbagai kota besar di Indonesia. Hal ini tentu mendorong munculnya reklasifikasi wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan. Sebagai contoh dialami oleh wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman yang pada satu dekade lalu telah mengalami reklasifikasi wilayah dari status wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan sejalan dengan telah dipenuhinya persyaratan wilayahnya sebagai wilayah permukiman kota yang meliputi 38 ribu hektar (BPS-DIY, 1994). Kenyataan ini menunjukkan besarnya tantangan wilayah perdesaan di Indonesia dalam mempertahankan karakteristik pertaniannya, yang tidak saja akan menyangkut masalah lingkungan dan ekonomi perdesaan, tetapi juga akan menyinggung masalah tradisi dan sosio-kultural masyarakatnya yang mau tidak mau harus menerima perubahan tersebut sebagai sebuah realitas.

Dampak Pertumbuhan Kota

Dilihat dari kepentingan pertumbuhan wilayah, fenomena perubahan dan pertumbuhan wilayah kota ke arah pinggiran kota harus dipandang tidak hanya dari sudut kepentingan wilayah kota, tetapi juga pada sudut kepentingan desa. Hal ini terkait dengan konsep bahwa eksistensi desa harus diposisikan sebagai *partner* kota yang saling membutuhkan. Ada kecenderungan bahwa pengembangan kegiatan nonpertanian di daerah pinggiran kota telah menyebabkan terjadinya kemiskinan di desa-desa pinggiran kota serta munculnya marginalisasi penduduk desa-desa

tersebut. Kaum marjinal tersebut dapat disejajarkan dengan kaum miskin di kota karena mereka tidak memiliki akses terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang layak. Mereka itu adalah para petani yang kemudian menyandang predikat buruh tani (*farm laborer*) karena tidak memiliki sawah, dan para pemilik tanah kecil (*landness*). Mereka inilah yang kemudian cenderung bermigrasi ke kota untuk menjadi migran permanen dan bekerja di sektor informal serta terpaksa tinggal di lahan-lahan ilegal di kota.

Terkait dengan konsep marginalisasi yang relevan dan berkembang di daerah pinggiran kota, Perlman dalam Muta'ali (1997) mengemukakan dua pendekatan dalam mendefinisikan marginalisasi.

1. Pendekatan psiko-sosial

Menurut pendekatan ini yang dimaksud dengan marginalisasi adalah individu atau orang yang hidup dalam dua budaya dan tradisi yang berbeda dan tidak dapat menyatu. Jika individu tersebut ingin beradaptasi, ia akan mengalami masalah atau kesulitan dengan masa lalu, tradisi, dan ras untuk diterima di lingkungan baru. Ia adalah orang yang berada dalam batas dua budaya dan dua golongan yang tidak dapat menyatu.

2. Pendekatan tradisional-modern

Menurut pendekatan ini, kaum marginal adalah kaum yang memiliki karakteristik personal untuk tetap menjadi miskin dalam lingkungan perubahan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kerugian ekonomi dan disorganisasi, tetapi juga karena kondisi yang memiliki struktur pemikiran dan mekanisme yang tidak dapat ditembus oleh kaum miskin itu. Sebagai contoh adalah kesulitan yang dihadapi untuk berpartisipasi dan berintegrasi dalam institusi atau kelembagaan karena adanya perasaan curiga, apatis, kurangnya kemampuan (*skill*), dan kurangnya pengetahuan.

Perkembangan wacana tentang perkotaan yang semakin meluas telah menjadikan suatu kekuatan tersendiri. Di satu sisi hal itu telah membentuk dominasi wacana dan pemahaman subjektif yang lebih berorientasi pada muatan dan pandangan kuantitatif bagi sebagian kalangan, di sisi lain pemahaman objektif yang lebih berorientasi pada muatan dan pandangan

kualitatif masih sangat kurang. Pandangan yang disebut terakhir tersebut telah memicu perhatian para pakar untuk melihat lebih jauh lagi dampak objektif perluasan kota. Akibatnya, kemunculan pandangan tentang daerah desa dan kota secara rekonstruktif tidak terhindarkan yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun sebelumnya. Sifat dikotomis desa dan kota kemudian menjadi persoalan yang sangat rumit. Desa di satu sisi masih dipandang sebagai suatu komunitas yang homogen, penuh dengan kegiatan yang bersifat tradisi dan bercorak pertanian. Sementara kota dipandang sebagai kompleksitas wilayah yang berkembang secara heterogen, menggeser tradisi dengan berbagai gaya hidup modern dan bercorak industri dan perdagangan. Validitas teoretis (Tonnie, 1958) --yang telah melanggengkan sifat dikotomis desa dan kota-- sebenarnya melihat masyarakat dalam dua kelompok komunitas besar yaitu komunitas berdasarkan kekerabatan (*kinship*) dan berdasarkan ekonomi dan politik. Pandangan Tonnie tersebut pada hakikatnya telah menggiring pemahaman umum ke dalam celah disparitas desa dan kota.

Pemahaman dikotomis antara desa dan kota telah lebih banyak memberikan kontribusi negatif terhadap eksistensi desa dan menyeret desa-desa pada posisi yang lemah dan sulit terhadap setiap usaha eksploitasi lahan pertanian untuk fungsi nonpertanian. Sementara itu, praktik eksploitasi lahan di pinggiran perkotaan yang dilakukan oleh para pengembang di bidang perumahan dalam skala besar pun (yang tidak didasari oleh suatu konsep perencanaan dan perancangan keruangan yang matang secara fisik dan sosial) agaknya sulit dibendung akibat (1) masih lemahnya kontrol pelaksanaan rencana-rencana di lapangan; (2) kelangkaan perangkat peraturan yang mengatur tata guna lahan, baik secara tekstual maupun spasial. Disadari atau tidak, praktik eksploitasi lahan yang tidak terkontrol tersebut cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya (1) segmentasi masyarakat dan pluralisasi komunitas di daerah pinggiran kota serta (2) kompleksitas mozaik peruntukan lahan yang mengarah pada gejala fragmentasi lahan.

Besarnya tingkat diferensiasi para pendatang dengan penduduk lokal, baik pada kelompok dan pelapisan sosial maupun ekonomi pada banyak kasus telah menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan berinteraksi sosial yang dicerminkan oleh memudarnya kualitas hubungan personal

pendatang dan penduduk lokal. Hal ini ditunjang dengan *setting* permukiman mereka yang terbagi secara fisik keruangan, yang justru menimbulkan gejala diskordansi spasial (perpecahan keruangan antarkelompok hunian) yang memicu timbulnya superioritas pendatang. Eksklusivitas kelompok sosial pendatang yang sudah terbiasa hidup dalam ritme mekanistik dan cenderung individualistik sering dituding sebagai pemicu munculnya celah sosial dengan masyarakat lokal yang masih berorientasi pada masyarakat organik komunalistik. Wirth (1938) menegaskan bahwa tata cara hidup perkotaan ini merupakan stereotipe pandangan hidup masyarakatnya yang kian berkembang.

Dari cara pandang linier, proses perluasan kota yang berdampak pada perubahan struktur keruangan dan terpecahnya lahan yang ada menjadi lahan-lahan sempit (*fragmentasi lahan*) sebenarnya merupakan awal dari percepatan proses konversi lahan karena lahan yang relatif kecil akan lebih mudah berpindah tangan kepada para pendatang. Disadari benar bahwa perubahan tersebut tidak harus dipandang sebagai suatu isu yang mengarah pada dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, tetapi yang penting dan perlu diperhatikan adalah perlunya merumuskan konsideran guna mengarahkan sasaran pengembangannya agar proses perubahan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan arah dan tahapan yang benar.

Secara keruangan menurunnya kuantitas lahan pertanian yang menjadi ciri khas wilayah perdesaan akibat proses perluasan kota yang merambah wilayah perdesaan dapat dilihat pada kasus Desa Maguwoharjo yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur laut kota Yogyakarta. Penggunaan lahan di desa ini ditandai oleh adanya penggunaan lahan secara campuran antara lahan kedesaan dan lahan kekotaan. Percampuran ini tampaknya semakin intens di daerah-daerah yang memiliki koneksitas tinggi terhadap pusat kota. Tabel 1 menunjukkan proporsi setiap jenis penggunaan lahan yang ada ditinjau dari luasannya dengan menggunakan skala desa dan diperoleh dari analisis Peta 1.

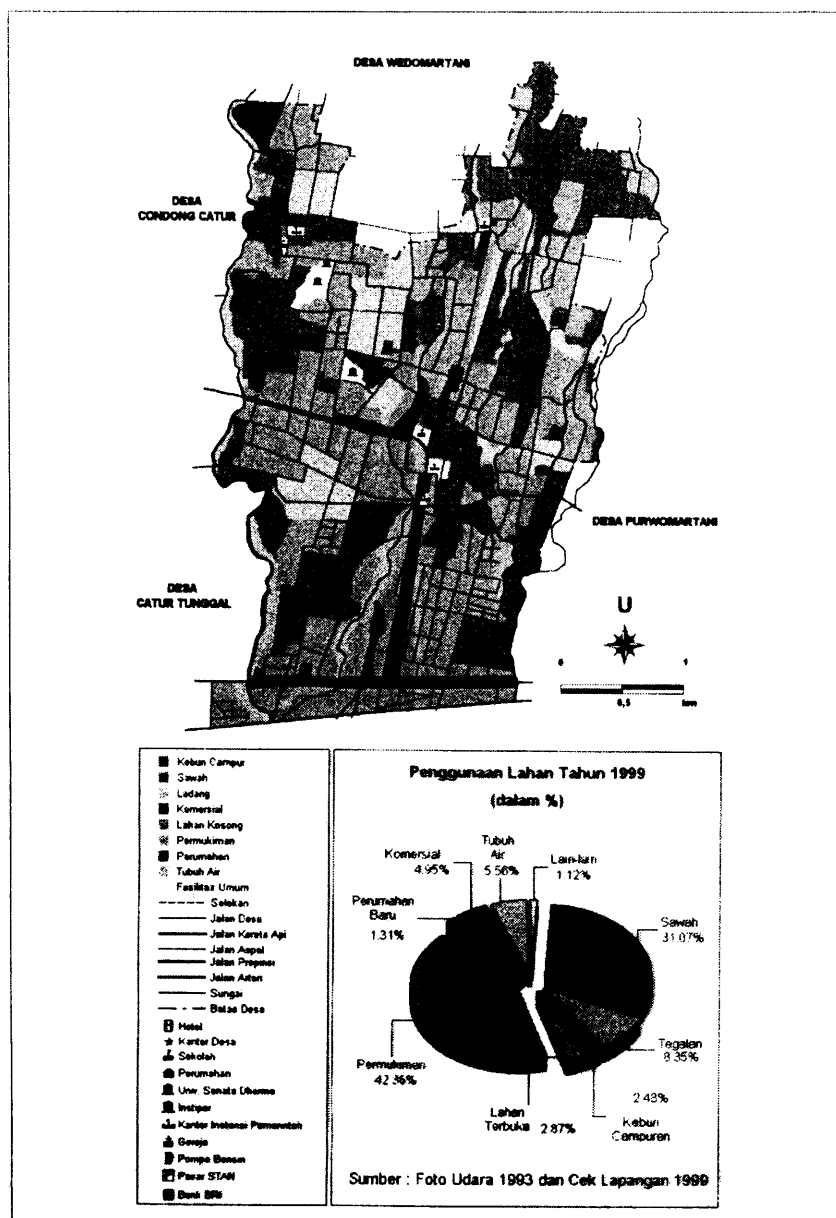
Dari data tersebut terlihat bahwa daerah terbangun di desa ini telah menyamai ruang terbuka yang ada, walaupun bagian terbesar dari daerah ini didominasi oleh permukiman penduduk lokal (42,36 persen). Proses alih fungsi lahan diperparah oleh pandangan sebagian besar masyarakat desa tentang fungsi tanah. Pada awalnya masyarakat memandang tanah

sebagai tanah pusaka yang harus dijaga kelestariannya dengan menciptakan sistem nilai yang mengatur pengalihan hak milik tanah kepada pihak lain. Namun, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, tanah telah berkembang sebagai aset ekonomi yang pada saat tertentu merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pemiliknya. Dengan kata lain, telah terjadi komersialisasi tanah. Indikatornya adalah (1) pengalihan tanah kepada pihak lain yang terjadi beberapa kali tanpa ada alih fungsi dan (2) melambungnya harga tanah. Kondisi ini telah menyebabkan penduduk lokal menjadikan pekerjaan di sawah sebagai pekerjaan sampingan. Menurunnya minat penduduk terhadap pekerjaan di sektor pertanian juga merupakan faktor pemacu konversi lahan akibat banyaknya alternatif kerja di luar sektor pertanian yang cepat menghasilkan uang (*cash money*). Namun, kurangnya wawasan ekonomi dan pemikiran tentang konsep nilai ekonomi tanah yang dikaitkan dengan dunia ekonomi modern pada akhirnya menjebak penduduk lokal pada kondisi yang lebih parah karena mereka justru sering tidak dapat menikmati keuntungan yang layak karena tanahnya dibeli dengan harga murah.

Tabel 1
Jenis Penggunaan Lahan Desa Maguwoharjo, Sleman, DIY, 1999

Jenis lahan	Luas (Hektar)	Persen (%)
Persawahan	379,06	31,07
Tegalan	101,81	8,34
Kebun campuran	29,60	2,43
Lahan terbuka	34,96	2,86
Kawasan permukiman (penduduk lokal)	516,75	42,36
Kawasan perumahan baru (pendatang)	15,98	1,31
Kawasan komersial	60,41	4,95
Daerah tubuh perairan	67,79	5,55
Lain-lain	13,64	1,13
Luas desa	1.220,00	100,00

Peta 1
Jenis Penggunaan Lahan Desa Maguwaharjo, Tahun 1999



Pendekatan Pengembangan Pola Keruangan Wilayah

Perumusan pola fisik spasial suatu wilayah merupakan tahap paling awal yang harus dilakukan dalam rangka menentukan peruntukan keruangannya. Gallion dan Eisner (1980) mengemukakan bahwa pola fisik keruangan suatu wilayah dapat dikenali melalui pemahaman pola tata guna tanah yang diimplementasikan di wilayah tersebut. Distribusi fungsi lahan yang direncanakan secara proporsional akan merupakan modal penting untuk mencapai keseimbangan pengembangan fisik, ekonomi, dan sosio kultural wilayah. Lebih jauh dikatakannya bahwa perencanaan tata guna lahan yang benar akan memberikan dampak positif terhadap angka pertumbuhan karakter, fisik, kualitas, dan pola lingkungan keruangan wilayah.

Isu sentral dari penentuan arah pola keruangan di daerah pinggiran kota untuk masa depan adalah isu pengembangan wilayah. Secara umum isu pengembangan dapat diidentifikasi melalui hal-hal berikut ini.

1. Identifikasi tujuan dan prinsip-prinsip pengembangan area peruntukan, baik untuk permukiman, komersial, rekreasi, pendidikan, maupun industri.
2. Identifikasi pola pengembangan dan pelestarian alam lingkungan yang berada di wilayah pinggiran kota.
3. Identifikasi fokus wilayah yang secara dominan memiliki potensi kurang mampu berkembang.
4. Identifikasi perencanaan dan pengembangan wilayah yang komprehensif.
5. Identifikasi implementasi program tata guna lahan secara efektif untuk melayani kepentingan penduduk sesuai dengan program perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan guna mengelola pengembangan wilayah pada masa mendatang.

Kelima identifikasi tersebut akan menghasilkan beberapa peta tematik yang kemudian perlu disintesis (*superimposed*) antarpeta. Hasil dari sintesis peta tersebut akan menghasilkan apa yang kemudian disebut sebagai pola keruangan guna lahan yang kemudian diformulasikan lebih lanjut guna mendapatkan gambaran topologi dan tipologi keruangan.

Tipe-tipe keruangan yang ada kemudian dianalisis secara induktif untuk dibuat generalisasi tipe keruangannya sehingga pola dasar tata ruangnya dapat distrukturkan dan model tata ruangnya dapat diformulasikan.

Dalam konteks wilayah, ruang-ruang yang berada di dalam wilayah tersebut akan membentuk struktur ruang yang disebut oleh Gallion sebagai unit ketetanggaan (*neighborhood unit*). Unit ketetanggaan ini sebenarnya tidak memiliki konotasi yang terkait dengan fenomena sosiologi. Istilah tersebut lebih bermakna lingkungan fisik yang secara spasial mengarah pada pemahaman ruang yang humanis. Busnell dalam Gallion dan Eisner (1980) menerjemahkan makna humanis tersebut sebagai suatu kondisi wilayah yang pengontrolan secara langsung terhadap ruang-ruang (bentuk dan luasan) serta kegiatan di dalam wilayah tersebut dapat dilakukan oleh penduduknya. Di daerah perdesaan di pinggiran kota hal ini masih mungkin dilakukan mengingat karakter hubungan interpersonal di perdesaan masih dapat ditemui. Pola pendekatan di atas ditujukan agar pola pemanfaatan lahan kekotaan di daerah pinggiran kota tidak terjadi secara melompat-lompat (*leap frogging development*). Pola perluasan kota yang terkendali tersebut dikenal dengan istilah akresi (*accretion expansion*). Tujuan dari pendekatan pengembangan pola keruangan wilayah ini adalah untuk mewujudkan kebijakan perluasan kota yang memperhatikan kepentingan sosio-kultural dan ekonomi desa dan dapat lebih diorientasikan pada distribusi merata yang mampu mengintegrasikan tata nilai fisik dengan realitas sosial dan kultural wilayah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kegiatan perluasan kota ke wilayah pinggiran kota yang tanpa batas dan kurang terkendali dapat mengakibatkan kesenjangan antara kondisi fisik spasial dengan kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Pada akhirnya akan bermuara pada kesenjangan antara strategi pembangunan pertanian dan perkotaan. Untuk itu, pembangunan wilayah pinggiran kota harus dipahami bukan sebagai bentuk lain dari perluasan kota. Konsekuensinya pembangunannya hendaknya dipadukan dengan kebijakan pengembangan kota antarregional (desa-kota) sehingga pola perluasan keruangannya dapat lebih diorientasikan pada distribusi merata yang mampu mengintegrasikan tata nilai fisik dan sosial wilayah. Hal ini perlu dikembangkan guna

menunjang interaksi ekonomi, sosial, kultural, serta mengedepankan peran positif yang disandang oleh para pendatang. Hal ini juga untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan daerah pinggiran sekaligus mengeliminasi ketimpangan antara pertumbuhan kota dan desa serta keseimbangan ekologis dan sosio-kultural antarregional. Perluasan kota bukanlah sekedar pengaturan tata ruang dan batas fisik semata-mata, tetapi juga menyangkut ideologi dan kondisi dinamika sosiologis masyarakatnya. Untuk itu, kebijakan dan upaya pengembangan strategi pembangunan tetap perlu diorientasikan pada eksistensi dan aspirasi masyarakat di pinggiran kota.

Ucapan terima kasih:

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penelitian UGM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan serangkaian penelitian di desa-desa pinggiran kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1996 hingga 2001 melalui kegiatan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar (1996-1997) dan Penelitian Hibah Bersaing VIII (1999-2001) sehingga penulisan ini, sebagai salah satu dari serial penulisan tentang perkembangan daerah pinggiran kota dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Setiadi (PSKK-UGM), MR Djarot Sadharto Widyatmoko (Fakultas Geografi UGM), dan Gutomo Bayu Aji (LIPI-Jakarta) yang telah membantu peneliti dalam mengadakan penelitian di lapangan.

Referensi

- Beesley, Ken B. and Lorne H. Russwurm (eds.). 1981. *The Rural-Urban Fringe: Canadian Perspectives*. Toronto: Department of Geography, York University. Geographical Monograph No. 10
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Biro Pusat Statistik. Kantor Statistik Propinsi DIY. 1994. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 1994*. Yogyakarta.
- Cernea, Michael M. 1988. *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta : kerjasama Bank Dunia dengan Penerbit Universitas Indonesia.

- Dowald, David. 1978. *Theories of Urban Form and Landuse: a Review*. Berkeley: Institute of Urban and Regional Development, University of California. Working Paper 295.
- Gallion, Arthur B. and Simon Eisner. 1980. *The American Urban Planning Pattern: City Planning and Design*. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
- Godtiener, Mark. 1985. *The Social Production of Urban Space*. Austin: University of Texas Press.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Muta'ali, Luthfi. 1997. *Dampak Transformasi Wilayah Perkotaan terhadap Integrasi Ruang Sosial Ekonomi dan Marjinalisasi Penduduk Lokal di Koridor Segitiga Joglosemar*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Urge Project-RRDP.
- Subroto, T. Yoyok Wahyu. 1996. "Keterkaitan antara nilai dan perwujudan ruang kawasan perdesaan", *Manusia dan Lingkungan: Jurnal Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada* 4(10):50-62, Desember.
- . 1997. "Pola perubahan spasial daerah pinggiran kota (urban fringe)", *Majalah Ilmiah Teknologi: Media Teknik* 19(4):10-16, Nopember.
- . 2001. *Model Pola Ruang Konsentris untuk Restrukturisasi Daerah Pinggiran Kota (Urban Fringe) di Indonesia: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing VIII tahun 1999-2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Tonnies, F. 1957. *Community and Society*. Michigan: Michigan State.
- Wirth, L. 1938. "Urbanism as a way of life", *American Journal of Sociology* 44(1):1-24.
- Yunus, Hadi Sabari. 1987. *Permasalahan Daerah Urban Fringe dan Alternatif Pemecahannya*. Makalah tidak dipublikasikan.
- . 2001 *Perubahan Pemanfaatan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi Program Doktor, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.